



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 14/10/2024
 Accepted : 17/10/2024
 Published : 29/10/2024

Mochamad Ronald
 Dian¹
 Fitriana²
 Vip Paramarta³

PENGARUH SPIP DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, ANTI FRAUD AWARENESS SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN PURWAKARTA

Abstrak

Fraud semakin merajalela dan berdampak negatif pada perekonomian negara. Laporan ACFE dan BPK menunjukkan tingginya kerugian akibat fraud di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan Good Government Governance (GGG) terhadap pencegahan fraud dalam perencanaan dan penganggaran dengan anti fraud awareness sebagai variabel moderasi di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perencana pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, baik pada Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Perencana dan staff. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah berjumlah 50 responden. Pengolahan data menggunakan software IBM SPSS 27. Kondisi SPIP, penerapan GGG, anti fraud awareness, dan pencegahan fraud dalam perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Purwakarta tergolong sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, GGG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, anti fraud awareness mampu memoderasi hubungan SPIP terhadap pencegahan fraud, anti fraud awareness mampu memperkuat hubungan GGG terhadap pencegahan fraud dan terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel SPIP dan GGG terhadap pencegahan fraud secara signifikan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Government Governance, Anti Fraud Awareness, Pencegahan Fraud..

Abstract

Fraud is becoming increasingly rampant and has a negative impact on the national economy. Reports from ACFE and BPK show the high losses due to fraud in Indonesia. This study aims to determine and analyze the influence of the Government Internal Control System (SPIP) and the implementation of Good Government Governance (GGG) on fraud prevention in planning and budgeting with anti-fraud awareness as a moderating variable in Purwakarta Regency Government. The research method used is a descriptive-verify method with a quantitative approach. The population in this study were Planners at the Purwakarta Regency Government, both at the Administrator Level, Supervisory Level, Functional Planning Staff, and staff. The data source used is primary data with a data collection method using questionnaires. The sample used was 50 respondents. Data processing uses IBM SPSS 27 software. The conditions of SPIP, the implementation of GGG, anti-fraud awareness, and fraud prevention in planning and budgeting in Purwakarta Regency Government are categorized as very good. The results showed that SPIP has a positive and significant effect on fraud prevention, GGG has a positive and significant effect on fraud prevention, anti-fraud awareness is able to moderate the relationship

¹ Magister Akuntansi, Universitas Sangga Buana

² Universitas Sangga Buana

email: ronald.rsba2018@gmail.com, fitrianadachlan64@gmail.com, Vip@usbykpk.ac.id

between SPIP and fraud prevention, anti-fraud awareness is able to strengthen the relationship between GGG and fraud prevention, and there is a significant simultaneous influence of SPIP and GGG variables on fraud prevention significantly.

Keywords: Internal Control System of the Government, Good Government Governance, Anti-Fraud Awareness, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat pada bidang akuntansi selain berkontribusi positif bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan, terutama maraknya tindakan kecurangan yang semakin meluas dan berpotensi mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Tindakan kecurangan dilakukan dengan sengaja, semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi (Alzoubi & Jaaffar, 2021). Ikhtisar Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk semester I Tahun 2023, merilis ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan. Laporan-laporan ini mencakup 9.261 temuan yang meliputi berbagai masalah, mulai dari kekurangan dalam sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian serta ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun (BPK.go.id, 2023). Bersumber pada Report Corruption Perception Index 2022 yang dilaksanakan oleh Transparency International (2023), menunjukkan bahwa indeks Indonesia mengalami kemerosotan signifikan pada tahun 2022, turun drastis dari 38 menjadi 34. Penurunan sebesar 4 poin ini merupakan yang terbesar sejak tahun 1995. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tersebut mengindikasikan lemahnya upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menindak kasus-kasus korupsi. Laporan Transparency International (2023) menegaskan bahwa upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia masih belum optimal. Perilaku fraud di lingkungan pemerintahan merupakan tantangan berat untuk dihilangkan karena berhubungan dengan mentalitas Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksananya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi delapan sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki, antara lain perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset daerah (kpk.go.id). Pada awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Purwakarta mengumumkan telah menemukan adanya tindak dugaan pidana korupsi yang melibatkan mantan kepala desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta atas dugaan korupsi Dana Desa Hingga Dana Bantuan Provinsi tahun anggaran 2022 (Detik.com, 2024). Kemudian, Mei 2024 Kejari Purwakarta mengungkap kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Bupati Purwakarta, yaitu penerimaan 1 unit mobil sebagai balas jasa (hadiah) dari Aparatur Sipil Negara Kabupaten Purwakarta (Pikiran Rakyat, 2024).

Handayani et al., (2023) menemukan hubungan negatif signifikan antara penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan tingkat korupsi di Indonesia. Syalwa et al., (2023) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah fraud. Begitu pula dengan hasil penelitian (Ayem & Kusumasari, 2020) yang mengungkapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap fraud. Penelitian Prena & Kusmawan (2020) menyimpulkan bahwa anti fraud awareness memiliki korelasi positif dengan pencegahan tindakan kecurangan. Kartadjudena & Indriyati (2021) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terbukti efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Namun, anti fraud awareness dapat memoderasi hubungan tersebut. Berbeda halnya dengan Flowerastia et al (2021), bahwa fraud awareness dan tata kelola perusahaan tidak memiliki efek signifikan terhadap pencegahan dan deteksi kecurangan.

Hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
- H2: Penerapan Good Government Governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
- H3: Anti fraud awareness mampu memoderasi hubungan antara implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud.
- H4: Anti fraud awareness mampu memoderasi hubungan antara penerapan Good Government Governance terhadap pencegahan fraud.
- H5: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Good Government Governance berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan fraud.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk mencapai tujuan penelitian. Tohardi (2019) mendefinisikan penelitian deksriptif tersebut adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeksripsikan keadaan dan atau situasi dari objek penelitian, analisisnya tergantung paradigma yang digunakan (kualitatif atau kuantitatif) dan tanpa melakukan pengujian terhadap Hipotesis. Metode verifikatif untuk membandingkan penerapan beberapa hal penting, seperti sistem pengendalian internal, good Government governance, anti fraud awareness, dan pencegahan fraud dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Purwakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan hal-hal tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan serta pengaruh yang signifikan secara statistik.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber datanya yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, sehingga keaslian dan keakuratan datanya dapat dijamin. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau objek yang sedang diteliti (Machmuddah, 2020). Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah dipilih secara purposive di instansi yang menjadi fokus penelitian. Populasi penelitian terdiri dari 101 Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Perencana, Staf Perencanaan/Penganggaran dan Jabatan lainnya. Jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak sampel 50 sampel. Pengolahan data menggunakan software IBM SPSS 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Suatu pernyataan dalam kuesioner dianggap valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang ditentukan dengan tingkat signifikansi tertentu. Nilai r_{tabel} dengan $N=50$ adalah 0,284 dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga apabila $r_{hitung} > 0,284$ maka pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Berikut ini hasil pengujian pernyataan kuesioner pada setiap variabel:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	1	0,603	0,284	Valid
	2	0,579	0,284	Valid
	3	0,703	0,284	Valid
	4	0,746	0,284	Valid
	5	0,768	0,284	Valid
	6	0,745	0,284	Valid
	7	0,704	0,284	Valid
	8	0,818	0,284	Valid
	9	0,666	0,284	Valid
	10	0,631	0,284	Valid
Good government governance (X2)	11	0,591	0,284	Valid
	12	0,768	0,284	Valid
	13	0,782	0,284	Valid
	14	0,779	0,284	Valid
	15	0,816	0,284	Valid
	16	0,826	0,284	Valid
	17	0,853	0,284	Valid
	18	0,699	0,284	Valid
	19	0,783	0,284	Valid
	20	0,729	0,284	Valid

Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	21	0,873	0,284	Valid
	22	0,768	0,284	Valid
	23	0,833	0,284	Valid
	24	0,784	0,284	Valid
	25	0,617	0,284	Valid
<i>anti fraud awareness</i> (Z)	26	0,812	0,284	Valid
	27	0,781	0,284	Valid
	28	0,804	0,284	Valid
	29	0,759	0,284	Valid
	30	0,775	0,284	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

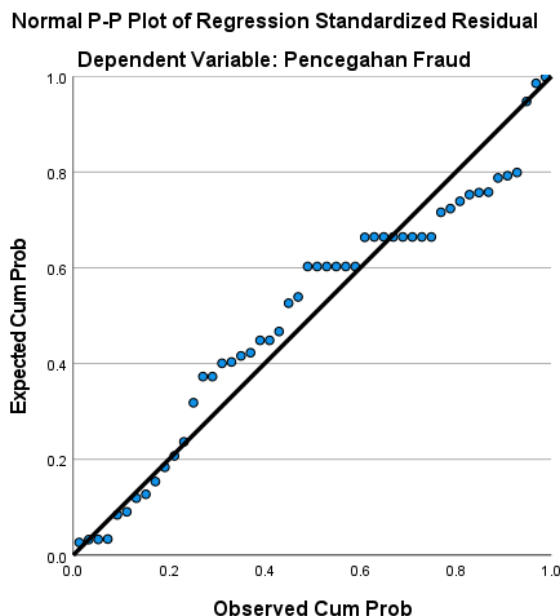
Untuk mengukur tingkat reliabilitas instrumen penelitian, digunakan teknik split-half dengan koefisien korelasi Spearman-Brown. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika nilai koefisien korelasi yang diperoleh $\geq 0,80$ (Jonathan sarwono, 2015).

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Koefisien reliabilitas (r)	Nilai Kritis	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,850	0,800	Reliabel
Good Government Governance	0,893	0,800	Reliabel
Pencegahan Fraud	0,824	0,800	Reliabel
Anti Fraud Awareness	0,819	0,800	Reliabel

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas ((P-P Plot of Regression)

Gambar 1 menunjukkan bahwa Garis diagonal dalam grafik P-P Plot mewakili distribusi normal teoritis. Normalitas data terindikasi oleh titik-titik data yang membentuk pola garis lurus pada plot. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut kemungkinan besar berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Output Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.540	1.991		.271	.787		
	SPIP	.266	.068	.487	3.922	<.001	.426	2.348
	Good Government governance	.212	.066	.399	3.206	.002	.426	2.348

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel SPIP mempunyai collinearity tolerance 0,426 > 0,10 dan nilai VIF 2,348 < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas sehingga dapat diketahui bahwa variabel SPIP tidak terdapat hubungan yang tinggi atau sempurna dengan variabel independen lain. Variabel good government governance mempunyai collinearity tolerance 0,426 > 0,10 dan nilai VIF 2,348 < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas sehingga dapat diketahui bahwa Variabel good government governance tidak memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna dengan variabel independen lain.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial t

Tabel 4. Model Regresi I untuk Hipotesis Kesatu

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.623	.615	1.490

a. Predictors: (Constant), SPIP

Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel 'Sistem Pengendalian Intern Pemerintah' memiliki kontribusi sebesar 61,5% dalam menjelaskan terjadinya pencegahan fraud. Sisanya, sebesar 38,5%, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Tabel 5. Signifikansi Nilai F Model Regresi I untuk Hipotesis Kesatu

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.185	1	176.185	79.381	.000 ^b
	Residual	106.535	48	2.219		
	Total	282.720	49			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), SPIP

Tabel 6. Signifikansi Nilai t Model Regresi I untuk Hipotesis Kesatu

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.693	2.048		1.315	.195
	SPIP	.431	.048	.789	8.910	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Tabel 5 memperlihatkan nilai F_{hitung} sebesar 79,381 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan SPIP memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Tabel 4.16 menunjukkan t_{hitung} Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 8,910 > t_{tabel} 2,011 dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka Hipotesis kesatu adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

SPIP dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda fraud dan mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal dari berbagai informasi. Fraud akan bisa dicegah apabila SPIP sudah diterapkan dengan baik dan benar. Penerapan SPIP yang efektif dapat membantu mencegah fraud, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. SPIP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud/korupsi. Semakin kuat SPIP, semakin kecil celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku fraud/korupsi (Pratiwi & Handayani, 2023).

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Tabel 7. Model Regresi I untuk Hipotesis Kedua

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.590	.581	1.555

a. Predictors: (Constant), Good Government governance

Berdasarkan Tabel 7, nilai R-squared sebesar 0,581 mengindikasikan bahwa variabel good governance mampu menjelaskan sekitar 58,1% variasi dalam variabel pencegahan fraud. Sisanya, sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Tabel 8. Signifikansi Nilai F Model Regresi I untuk Hipotesis Kedua

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166.699	1	166.699	68.967	.000 ^b
	Residual	116.021	48	2.417		
	Total	282.720	49			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Good Government governance

Tabel 9. Signifikansi Nilai t Model Regresi I untuk Hipotesis Kedua

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.317	2.121		1.563	.125
	Good Government governance	.408	.049	.768	8.305	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Tabel 8 memperlihatkan nilai F_{hitung} sebesar 68,967 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa good government governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Tabel 9 menunjukkan t_{hitung} Sistem good government governance sebesar 8,305 > t_{tabel} 2,011 dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka Hipotesis kedua adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka good government governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

Penerapan Good Government Governance dalam instansi pemerintah ditandai dengan terlaksananya program-program secara terkendali, serta efektif dan efisien, mencakup seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan yang matang dan terukur, pelaksanaan yang akuntabel dan sesuai dengan target, pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, hingga pertanggungjawaban kepada publik.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Tujuan utama Moderated Regression Analysis dalam penelitian ini adalah untuk meninjau kemungkinan variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dilakukan pengujian Moderated Regression Analysis untuk mengevaluasi peran anti fraud awareness sebagai pemoderasi dalam menengahkan korelasi antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan good government governance dengan pencegahan fraud.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Tabel 10. Hasil Model Regresi II untuk Hipotesis Ketiga

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	.815	.807	1.055

a. Predictors: (Constant), X1Z, SPIP

Tabel 10 menunjukkan Angka adjusted R Square sebesar 0,807 atau 80,7%, terdapat peningkatan nilai adjusted R Square dari model regresi I (tabel 4.14) ke model regresi II sebesar 19,2%, artinya variabel anti fraud awareness (Z) mampu memperkuat hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud.

Tabel 11. Signifikansi Nilai t Model Regresi II untuk Hipotesis Ketiga

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.445	2.334		6.617	.000
	SPIP	-.209	.098	-.383	-2.133	.038
	X1Z	.016	.002	1.251	6.974	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Tabel 11 memperlihatkan variabel X1Z (interaksi antara variabel X1 dengan variabel Z) mempunyai $t_{hitung} 6,974 >$ dari nilai $t_{tabel} 2,011$ dengan signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel anti fraud awareness (Z) mampu memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud. Maka persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 15,445 - 0,209X1 + 0,16(X1Z) + e$$

- X1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Y : Pencegahan fraud
- Z : Anti fraud awareness
- e : error

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 15,445 tanpa ada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan anti fraud awareness sebagai variabel moderasi maka pencegahan fraud memiliki nilai sebesar 15,445. (2) Nilai koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar -0,209 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka menurun sebesar 0.209. (3) Nilai koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan moderasi anti fraud awareness (X1Z) sebesar 0,16 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan moderasi anti fraud awareness (X1Z) maka pencegahan fraud meningkat sebesar 0,16.

Upaya untuk menumbuhkan anti fraud awareness menurut AICPA (2003) adalah membangun budaya kejujuran dan etika yang baik, mengevaluasi risiko-risiko fraud dan

pengawasan yang memadai. Aziz & Othman (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran terhadap kecurangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas deteksi dan pencegahan fraud.

Hasil Uji Hipotesis Keempat

Tabel 12. Hasil Model Regresi II untuk Hipotesis Keempat

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.810	.802	1.069

a. Predictors: (Constant), X2Z, Good Government governance

Tabel 12 menunjukkan Angka adjusted R Square 0,802 atau 80,2%, terdapat peningkatan nilai adjusted R Square dari model regresi I (table 4.17) ke model regresi II sebesar 22,1%, artinya variabel anti fraud awareness (Z) berhasil meningkatkan hubungan good government governance (X2) terhadap pencegahan fraud.

Tabel 13. Signifikansi Nilai t Model Regresi II untuk Hipotesis Keempat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.828	2.448		7.283	.000
	Good Government governance	-.292	.101	-.549	-2.899	.006
	X2Z	.017	.002	1.398	7.383	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Dari tabel 13 memperlihatkan variabel X2Z (hubungan antara variabel X2 dengan variabel Z) mempunyai thitung 7,383 > dari nilai ttabel 2,011 dengan tingkat signifikasi kurang dari 0,05. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel anti fraud awareness (Z) dapat memoderasi hubungan good government governance (X2) terhadap pencegahan fraud (Y). Maka persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 17,828 - 0,292X2 + 0,167(X2Z) + e$$

Keterangan:

- X2 : good government governance
- Y : Pencegahan fraud
- Z : Anti fraud awareness
- e : error

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 17,828 tanpa ada good government governance dan anti fraud awareness sebagai variabel moderasi maka pencegahan fraud memiliki nilai sebesar 17,828. (2) Nilai koefisien regresi good government governance sebesar -0,292 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada good government governance maka menurun sebesar 0.292. (3) Nilai koefisien regresi good government governance dengan moderasi anti fraud awareness (X1Z) sebesar 0,167 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada implementasi good government governance dengan moderasi anti fraud awareness (X1Z) maka pencegahan fraud meningkat sebesar 0,167. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan Good Governance dan kesadaran anti fraud berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Dengan memoderasi hubungan antara penerapan Good Government Governance dan pencegahan fraud melalui Anti Fraud Awareness, organisasi dapat membangun lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka Panjang.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 14. Output Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	195.303	2	97.652	52.503	<.001 ^b
	Residual	87.417	47	1.860		
	Total	282.720	49			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Good Government governance, SPIP

Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan good government governance terhadap pencegahan fraud adalah $0,01 < 0,05$ dan nilai Fhitung $52,50 >$ nilai Ftabel $3,195$. Hasil uji statistic tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan good government governance terhadap pencegahan fraud secara signifikan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Good Government Governance merupakan dua pilar penting dalam membangun mencegah fraud. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Good Government Governance yang efektif membutuhkan komitmen, kerja sama, dan partisipasi dari semua pihak dalam Perangkat Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Good Government Governance saling memperkuat dalam pencegahan fraud. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko fraud. Good Government Governance menciptakan lingkungan yang positif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan penerapan yang tepat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Good Government Governance dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan stakeholders.

SIMPULAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Objek penelitian, secara keseluruhan sudah mengaplikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sangat baik. Pimpinan secara konsisten telah menunjukkan integritas dan prinsip-prinsip etika dalam kesehariannya, secara proaktif mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi potensi risiko, serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Penilaian sembilan indikator Good Government Governance pada objek yang diteliti diperoleh kesimpulan “sangat Baik”.

Anti fraud awareness mampu memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud. Anti fraud awareness mampu memperkuat hubungan tersebut. Semakin baik pelaksanaan anti fraud awareness maka semakin meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pegawai atas kecurangan (fraud), peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan secara signifikan. Anti fraud awareness mampu memoderasi hubungan good government governance terhadap pencegahan fraud. Semakin tinggi anti fraud awareness maka akan meningkatkan hubungan good government governance terhadap upaya pencegahan fraud. ‘Semakin baik pelaksanaan anti fraud awareness maka semakin meningkatkan efektifitas good government governance. Anti fraud awareness mampu memperkuat hubungan tersebut. Anti fraud awareness memainkan peran kunci dalam memperkuat good government governance dengan meningkatkan partisipasi, pengawasan, ‘transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif & efisien akuntabilitas, dan visi strategis. Kesadaran ini mendukung prinsip-prinsip good government governance dan memastikan bahwa potensi penipuan dapat dideteksi dan dicegah secara efektif, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan good government governance secara simultan terdapat pengaruh signifikan pada variabel terhadap pencegahan fraud. Hal ini

memperlihatkan bahwa efek dari kedua variabel tersebut tidak hanya kuat secara individual tetapi juga ketika dikombinasikan. Sehingga dapat melengkapi dan memperkuat satu sama lain dan menghasilkan sistem yang lebih efektif dalam pencegahan fraud.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan penelitian di atas maka penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: (1) Hasil survei indikator informasi dan komunikasi pada variabel SPIP menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada posisi terendah dibandingkan dengan indikator lain pada variabel SPIP. Oleh karena itu, Perangkat Daerah perlu meningkatkan kembali informasi mengenai SPIP melalui berbagai platform media, baik cetak maupun elektronik. (2) Hasil survei indikator partisipasi pada variabel Good Government Governance menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada posisi terendah dibandingkan dengan indikator lain pada variabel Good Government Governance. Oleh karena itu, Perangkat Daerah perlu meningkatkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, transparansi dalam pengelolaan keuangan, perencanaan yang terstruktur, dan pelaksanaan yang efektif. (3) Hasil survei indikator organisasi pada variabel Pencegahan fraud menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada posisi terendah dibandingkan dengan indikator lain pada variabel Pencegahan fraud. Oleh karena itu, Perangkat Daerah perlu meningkatkan penguatan struktur tim pencegahan fraud, frekuensi evaluasi serta pengembangan proses berkesinambungan. (4) Hasil survei indikator mengevaluasi risiko-risiko fraud pada variabel Anti fraud awareness menunjukkan bahwa indikator tersebut berada pada posisi terendah dibandingkan dengan indikator lain pada variabel Anti fraud awareness. Oleh karena itu, Perangkat Daerah perlu meningkatkan spesifikasi dan perluasan mitigasi risiko, peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap strategi mitigasi risiko serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. (5) Bagi Peneliti lain, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal serta menggunakan variabel moderasi lain yang mampu menjadi faktor peningkatan hubungan pengaruh SPIP dan good government governance terhadap pencegahan fraud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Fitriana, S.E., M.Si., CA., Ak dan Bapak Dr. H. Vip Paramarta., Drs., MM., CFrA. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (2003). *Fraud Detection in a GAAS Audit: SAS No. 99 Implementation Guide*. American Institute of Certified Public Accountants, Inc., 168, 1–225.
- Alzoubi, R. H., & Jaaffar, A. H. (2021). The Moderating Effect of Leaders' Experience on Leadership Styles and Crisis Management in the Jordanian Hotel Sector. *International Journal of Financial Research*, 12(1), 297. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n1p297>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- BPK.go.id. (2023). *BPK UNGKAP 9.261 TEMUAN SENILAI RP18,19 TRILIUN PADA SEMESTER I TAHUN 2023*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9261-temuan-senilai-rp1819-triliun-pada-semester-i-tahun-2023>
- Budiantoro, H., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) , Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2474>
- Detik.com. (2024). *Korupsi Dana Desa hingga Banprov, Eks Kades di Purwakarta Ini Dibui*.
- Handayani, F., Gamayuni, R. R., & Alvia, L. 2023. (n.d.). *The Impact of Implementing E-*

- Government , the Government Internal Control System (SPIP), the Capability of the Government Internal Control Apparatus (KAPIP) on Corruption Prevention in Provincial Governments in Indonesia. 3(2023). <https://doi.org/10.4108/eai.13-9-2023.2341130>
- Kartadjumena, E., & Indriyati, N. (2021). Pengaruh Moderasi Kesadaran Anti Kecurangan dan Moralitas pada Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(1), 25–35.
- Machmuddah, Z. (2020). *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*. Deepublish.
- Pratiwi, N., & Handayani, A. P. (2023). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Desa Di Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 7(1), 66–77.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24275>
- Rakyat, P. (n.d.). Kasus Korupsi, Gratifikasi di Purwakarta Naik Penyidikan, Kejaksaan Periksa 8 Saksi Termasuk ASN. 2024. <https://idejabar.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3528053005/kasus-korupsi-gratifikasi-di-purwakarta-naik-penyidikan-kejaksaan-periksa-8-saksi-termasuk-asn?page=all>
- Syalwa, M., Maria, M., & Sarikadarwati. (2023). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas PUPR Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 1–8.
- Tohardi, D. A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial +*. Tanjungpura University.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions*. 16. www.transparency.org/cpi